

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN SAPI LOKAL (SAPI BALI) DALAM MENUNJANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PROTEIN HEWANI DAN SWASEMBADA DAGING

GOVERNMENT POLICY IN EFFORTS TO DEVELOP LOCAL COWS (BALI COWS) IN SUPPORTING THE FULFILLMENT OF ANIMAL PROTEIN NEEDS AND MEAT SELF-SUFFICIENCY

Sapta Andaruisworo*

¹Prodi Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri
sapta@unpkediri.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan sapi potong, khususnya di daerah Pulau Jawa dan Bali di masa yang akan datang harus dilakukan melalui suatu pendekatan agribisnis yang berkelanjutan. Budidaya sapi potong secara on farm harus dilakukan secara modern dan professional disertai dengan pemanfaatan inovasi teknologi untuk efisiensi usahanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi usaha pembibitan sapi potong kurang diminati oleh peternak dan untuk mengetahui pola pengembangan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan protein asal hewani dan Swasembada daging di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pengembangan Sapi Bali yaitu khususnya di Provinsi Bali. Sementara metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dan survei di wilayah pengembangan Sapi Bali.

Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih mengharapkan import dari negara lain, oleh karena kemampuan ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi belum dicapai. Untuk meningkatkan populasi sapi perlu diperhatikan tiga hal yakni; sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan. Pola kebijakan pengembangan diarahkan pada pola kemitraan sehingga peran pemerintah lebih hanya kepada pemberi motivator, sebagai fasilitator dan regulator. Diperlukan program pemuliaan untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu genetik sapi Bali di Daerah pengembangan.

Kata kunci: Kebijakan pemerintah, Sapi Bali, Protein Hewani, Swasembada Daging.

ABSTRACT

The development of beef cattle, especially in the areas of Java and Bali in the future, must be carried out through a sustainable agribusiness approach. On-farm beef cattle cultivation must be carried out in a modern and professional manner accompanied by the use of technological innovations for business efficiency. The purpose of this study is to determine the factors that influence the beef cattle breeding business is less attractive to farmers and to determine the pattern of development in supporting the fulfillment of protein needs of animal origin and meat self-sufficiency in Indonesia. This research was carried out in the Bali Cattle development area, especially in Bali Province. Meanwhile, this research method is carried out using case study and survey methods in the Bali Cattle development area.

In the discussion, it was found that the beef consumption needs of the Indonesian people still expect imports from other countries, because the ability of local livestock to meet the needs of beef consumption has not been achieved. To increase the cattle population, three things need to be considered, namely; human resources, natural resources and sustainable animal feed resources. The development policy pattern is directed at the

partnership pattern so that the role of the government is only to give motivators, as facilitators and regulators. Breeding programs are needed to maintain or improve the genetic quality of Bali cattle in development areas

Keywords: Government policy, Bali Cattle, Animal Protein, Meat Self-Sufficiency.

PENDAHULUAN

Pengembangan sapi potong, khususnya di daerah Pulau Jawa dan Bali di masa yang akan datang harus dilakukan melalui suatu pendekatan agribisnis yang berkelanjutan. Budidaya sapi potong secara *on farm* harus dilakukan secara modern dan professional disertai dengan pemanfaatan inovasi teknologi untuk efisiensi usahanya. Kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena penambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging (Purnawan, 2012). Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini dipasok dari tiga pemasok yaitu ; peternakan rakyat (ternak lokal), industri peternakan rakyat (hasil penggemukan sapi ex-import) dan impor daging (Harmini., Asmarantaka dan Atmakusuma. 2011). Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk tetap menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan ternak potong, usaha peternakan rakyat tetap menjadi tumpuan utama, namun tetap menjaga kelestarian sumberdaya ternak sehingga setiap tahun mendapat tambahan akhir positif.

Pengembangan sapi potong telah banyak dilakukan, dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi terpenuhinya permintaan pasar, seperti mengimpor daging dan sapi bakalan untuk penggemukan. Padahal solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan meningkatkan produktivitas sapi potong di Indonesia (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2016). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/Ot.140 /10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice) menyebutkan bahwa Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan dan Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Bibit ternak yang berasal dari plasma nutfah lokal merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan industri peternakan dan mempunyai peranan yang menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Aspek pembibitan pada sub sektor peternakan mempunyai peranan yang strategis karena benih dan bibit ternak

merupakan awal dari serangkaian proses produksi ternak. Untuk memenuhi kebutuhan akan bibit ternak dari segi jumlah dan mutu secara nasional, perlu dilakukan pengkajian pengembangan breeding sapi potong di Indonesia.

Program Swasembada Daging Sapi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal. Pencapaian swasembada daging sapi merupakan tantangan yang tidak mudah, karena pada tahun 2009 impor daging mencapai 70 ribu ton dan sapi bakalan setara dengan 250,8 ribu ton daging (Ditjenak, 2010). Angka ini kira-kira meliputi 30 persen dari kebutuhan daging nasional. Bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat menjadi sekitar 720 ribu ekor sapi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani, khususnya daging sapi, semakin jauh dari harapan, dan menyebabkan Indonesia masuk dalam perangkap pangan negara eksportir.

Pemerintah sudah beberapa kali telah mencanangkan program swasembada daging, namun program ini belum sampai terwujud saat ini. Program swasembada daging sapi ini disebut berhasil, jika kita bisa memenuhi keperluan daging sapi potong dalam negeri. Program swasembada ini dapat terwujud dengan baik dengan meningkatkan jumlah populasi ternak dalam jumlah yang besar.

Sapi Bali merupakan *breed* sapi asli Indonesia mempunyai potensi yang besar, diharapkan dapat mensuplay sebagian dari kekurangan tersebut. Sapi Bali mempunyai populasi dengan jumlah 2.632.125 ekor atau sekitar 26,92% dari total populasi sapi potong yang ada di Indonesia (Ardhy Al-Maqasary, 2014). Adapun perbandingan populasi sapi Ongole, Peranakan Ongole, Bali, sapi Madura dan sapi lainnya Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah populasi sapi Ongole, PO, Bali dan sapi Madura Tahun 2013*

Bangsa	Jumlah	Persentase
Ongole	260.094	2.66
Peranakan Ongole	773.165	8.17
Bali	2.632.125	26.92
Madura	1.131.375	11.57
Lainnya	4.979.830	50.68

Sumber : Ardhy Al-Maqasary, (2014)

Tabel 1 menunjukkan bahwa di Indonesia sapi potong masih didominasi sapi lainnya yang di impor dari negara lain misalnya Australia, dan tidak menutup kemungkinan bahwa jika perhatian ke ternak lokal tidak sedini mungkin diantisipasi maka ternak lokal akan semakin terkuras populasinya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi usaha pembibitan sapi potong kurang diminati oleh peternak dan untuk mengetahui pola pengembangan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan protein asal hewani dan Swasembada daging di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pengembangan Sapi Bali yaitu khususnya di Provinsi Bali. Sementara metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dan survei di wilayah pengembangan Sapi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Sapi Bali

Menurut Hardjosubroto, 1994 dalam Chamdi, A. N. 2005, bahwa Sapi Bali merupakan sapi potong asli Indonesia dan merupakan hasil domestikasi dari Banteng (*bibos banteng*) dan merupakan sapi asli Pulau Bali. Ditinjau dari sistematika ternak, sapi Bali masuk *familia Bovidae*, *Genus bos* dan *Sub-Genus Bovine*, yang termasuk dalam *sub-genus* tersebut adalah; *Bibos gaurus*, *Bibos frontalis* dan *Bibos sondaicus*.

Sapi Bali mempunyai ciri-ciri khusus antara lain; warna bulu merah bata, tetapi yang jantan dewasa berubah menjadi hitam. Satu karakter lain yakni perubahan warna sapi jantan kebirian dari warna hitam kembali pada warna semula yakni coklat muda keemasan yang diduga karena makin tersedianya hormon testosteron sebagai hasil produk testes (Santoso, Kholid, Warsito, S.ST dan Agus Andoko; 2012).

Chamdi, A.N. (2005) menyatakan bahwa ada tanda-tanda khusus yang harus dipenuhi sebagai sapi Bali murni, yaitu warna putih pada bagian belakang paha, pinggiran bibir atas, dan pada paha kaki bawah mulai tarsus dan carpus

sampai batas pinggir atas kuku, bulu pada ujung ekor hitam, bulu pada bagian dalam telinga putih, terdapat garis belut (garis hitam) yang jelas pada bagian atas punggung, bentuk tanduk pada jantan yang paling edial disebut bentuk tanduk *silak congklok* yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit keluar lalu membengkok keatas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit keluar. Pada yang betina bentuk tanduk yang edial yang disebut *manggul gangsa* yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah kebelakang sedikit melengkung kebawah dan pada ujungnya sedikit mengarah kebawah dan kedalam, tanduk ini berwarna hitam. Saat ini penyebaran sapi Bali telah meluas hampir keseluruhan wilayah Indonesia, konsentrasi sapi Bali terbesar adalah di Sulawesi Selatan, Pulau Timor, Bali dan Lombok. Guntoro, S (2012) menyatakan bahwa jumlah sapi Bali di Sulawesi Selatan dan Pulau Timor telah jauh melampaui populasi sapi Bali ditempat asalnya (Pulau Bali). Pada tahun 2011 ditaksir jumlah sapi Bali di Indonesia sekitar 3,2 juta, dengan jumlah terbanyak di Sulawesi Selatan (1,8 juta ekor), Nusa Tenggara Timur (625 ekor) dan Pulau Bali (456 ekor).

Produktivitas Sapi Bali

Produktivitas adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak pada ukuran waktu tertentu dan produktivitas sapi potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan pertumbuhan. Talib, C., K Uswandi, Chalijah, dan A.R. Siregar. 2000, menyatakan bahwa aspek produksi seekor ternak tidak dapat dipisahkan dari reproduksi ternak yang bersangkutan, dapat dikatakan bahwa tanpa berlangsungnya reproduksi tidak akan terjadi produksi.

Wibisono (2010) melaporkan karakteristik reproduksi dan produksi sapi bali adalah sebagai berikut:

- Fertilitas sapi bali : 83 – 86 %, lebih tinggi dibandingkan sapi Eropa yang 60%.
- Periode kebuntingan: 280 – 294 hari.
- Persentase kebuntingan (*Conception rate*) : 86,56 %.
- Tingkat kematian kelahiran anak sapi : 3,65 %
- Persentase kelahiran (*Calving rate*) : 83,4 %.
- Interval penyapihan (*Calving interval*) : 15,48 – 16,28 bulan.
- Umur dewasa kelamin betina : 18-24 bulan, kelamin jantan : 20-26 bulan

- Umur kawin pertama betina: 18-24 bulan, jantan: 23-28 bulan
- Beranak pertama kali : 28-40 bulan dengan rata-rata 30 bulan
- Rata-rata siklus estrus : 18 hari, sapi betina dewasa muda berkisar antara 20 – 21 hari.
- Sedangkan pada sapi betina yang lebih tua : 16-23 hari, selama 36 – 48 jam berahi dengan masa subur antara 18 – 27 jam dan menunjukkan birahi kembali setelah beranak antara 2-4 bulan .
- Sapi bali menunjukkan estrus musiman (seasonality of oestrus), pada Bulan Agustus – januari : 66%. Pada Bulan Mei – Oktober : 71%
- Data dari kelahiran terjadi bulan Mei – Oktober, dengan sex ratio kelahiran jantan : betina sebesar 48,06% : 51,94%.
- Berat lahir sapi Bali anak betina sebesar 15,1 kg, dan 16,8 kg untuk anak jantan
- Berat lahir sapi bali pada pemeliharaan dengan monokultur padi, pola tanam padi-palawija dan tegalan masing-masing sebesar 13,6, 16,8 dan 17,3 kg.
- Berat sapih kisaran antara 64,4-97 kg, untuk sapih jantan sebesar 75-87,6 kg dan betina sebesar 72-77,9 kg; 74,4 kg di Malaysia; 82,8 kg pada pemeliharaan lahan sawah, 84,9 kg dengan pola tanam padi – palawija, 87,2 kg pada tegalan.
- Berat umur setahun berkisar antara 99,2-129,7 kg dimana sapi betina sebesar 121-133 kg dan jantan sebesar 133-146 kg.
- Berat dewasa berkisar antara 211-303 kg untuk ternak betina dan 337-494 kg untuk ternak jantan.
- Pertambahan bobot badan harian sampai umur 6 bulan sebesar 0,32-0,37 kg dan 0,28-0,33 kg masing-masing untuk pedet jantan dan betina.
- Pertambahan bobot badan pada berbagai manajemen pemeliharaan antara lain pemeliharaan tradisional sebesar 0,23-0,27 kg ; penggembalaan alam sebesar 0,36 kg; perbaikan padang rumput sebesar 0,25-0,42 kg; pemeliharaan intensif sebesar 0,87 kg.

Sapi bali memiliki sedikit lemak halus, kurang daripada 4% dari berat karkasnya, tetapi persentase karkasnya cukup tinggi berkisar antara 52-60% dengan perbandingan tulang dan daging sangat rendah; komposisi daging 69-71%, tulang

14-17% lemak 13-14% <http://www.e-jurnal.com/2014/02/produktivitas-sapi-bali.html> diakses tanggal 5 Desember 2017.

Kebutuhan Sapi Potong

Pusat Data dan Informasi Pertanian. (2016), menyatakan bahwa kondisi peternakan sapi potong saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena penambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan daging. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika dilihat dari *trend* permintaan akan daging didalam negeri maka diperkirakan tahun 2020 diperlukan daging sapi sebanyak 670 ribu ton yang setara dengan sapi siap potong sebanyak empat juta ekor, sementara dari dalam negeri bila hanya mengandalkan teknologi yang dan kebijaksanaan yang ada dengan rata-rata peningkatan populasi 2–3% maka akan tersedia sebanyak 395.000 ton daging yang setara dengan 2,5 juta ekor berarti pada tahun 2020 akan kekurangan sebesar 1,5 juta ekor.

Menurut Haris Budiyono, (2014) bahwa Pada tahun 2013 diperkirakan Indonesia membutuhkan daging sapi sekitar 781.000 ton. Produksi daging sapi nasional diperkirakan hanya dapat memenuhi 434.300 ton sehingga akan terjadi kekurangan sebanyak 246.700 ton. Impor ternak sapi daging meningkat semakin tajam. Pengamatan selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa (i) volume impor ternak sapi (sebagian besar bakalan) meningkat dengan laju sekitar 43% per tahun, (ii) nilai impor ternak sapi meningkat sekitar 56% per tahun, (iii) volume impor daging sapi meningkat sekitar 40% per tahun dan (iv) nilai impor daging sapi meningkat sekitar 38% per tahun. Akibatnya defisit neraca perdagangan ternak dan daging sapi melonjak dari US\$ 19.7 juta pada tahun 2010 menjadi US\$ 150.6 juta pada tahun 2014. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, hal yang patut mendapat perhatian dalam perkembangan impor ternak sapi adalah pergeseran dari komoditi sapi bibit (*cattle breed*) ke jenis komoditi sapi bakalan (*feeder steers*). Perkembangan semacam ini mencerminkan ketidakmampuan industri pembibitan sapi di Indonesia untuk mengembangkan bibit unggul asal luar negeri guna meningkatkan kualitas bibit sapi lokal sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan populasi yang diharapkan. Dalam jangka panjang besarnya permintaan konsumsi daging sapi akan

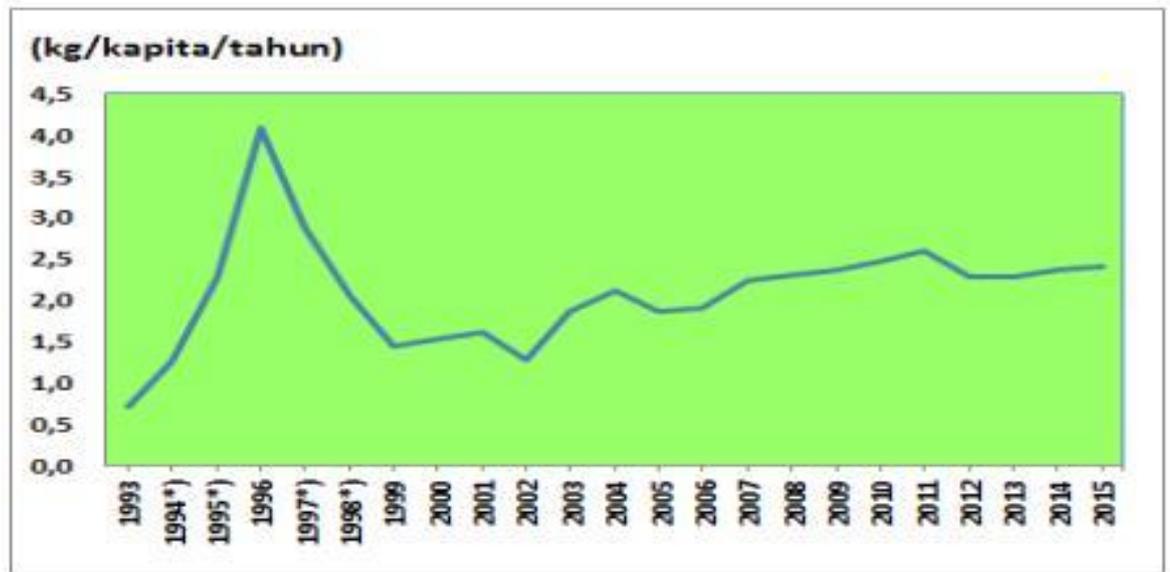
menyebabkan penurunan populasi secara nyata, dan apabila pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan angka *net-increase* dan *net-calf crop* sapi bukan hal yang tidak mungkin Indonesia masih terus akan mengimpor sapi meskipun harganya sangat mahal.

Kesenjangan Produksi dan Konsumsi Daging Domestik

Komoditas daging sapi bersifat *demand driven* sehingga dari waktu ke waktu masih bermasalah dalam pemenuhannya. Kesenjangan antara kebutuhan konsumsi dengan produksi daging sapi lokal terjadi tiap tahun, yang diduga karena adanya peningkatan jumlah masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas.

Konsumsi daging nasional terus meningkat kecuali saat terjadi krisis ekonomi. Konsumsi daging nasional pada periode krisis ekonomi tahun 1998 turun 26 persen dari 1.661,2 ribu ton pada tahun 1996, menjadi 1.242,6 ribu ton pada tahun 1998. Pada rentang tahun 2000-2010 konsumsi daging nasional pulih kembali pada tingkat rata-rata 1.517,5 ribu ton. Pada tahun 2011-2015 terjadi kenaikan kembali, namun tingkat kenaikannya tidak begitu besar. Perkembangan konsumsi daging dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

SINKESJAR



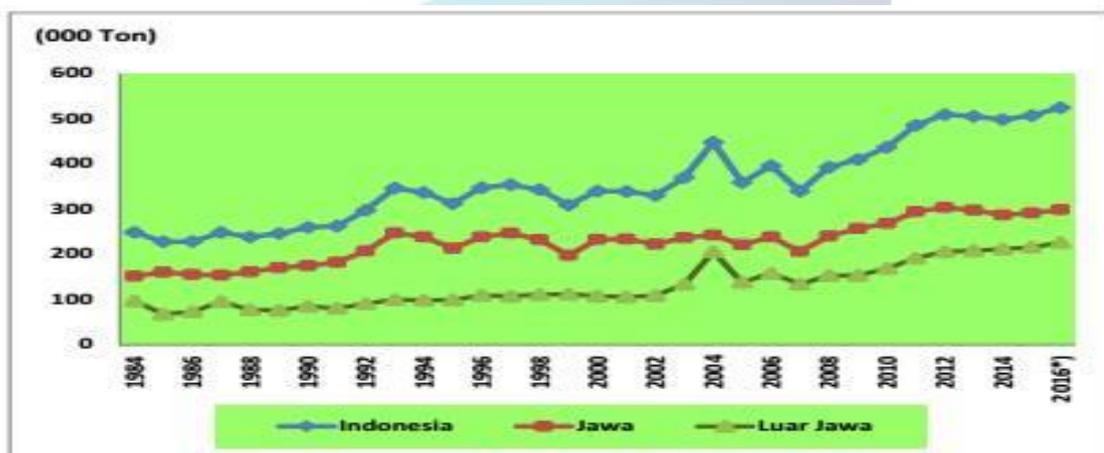
(Sumber : Pusat Data dan informasi Pertanian, 2016)

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Daging Sapi di Indonesia

Jumlah daging sapi yang harus tersedia ditentukan oleh kebutuhan konsumsi daging sapi secara nasional, disisi lain kebutuhan konsumsi daging sapi ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi daging sapi per kapita. Disamping itu kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya protein hewani makin meningkat, sehingga kebutuhan daging sapi nasional akan semakin meningkat. Kebutuhan daging secara nasional yang terus meningkat harus diimbangi dengan produksi daging sapi yang terus meningkat pula agar program Swasembada Daging dapat tercapai.

Perkembangan produksi daging sapi di Indonesia pada periode tahun 1984 – 2016 secara umum memiliki pola yang sama baik di Jawa maupun luar Jawa, yaitu cenderung meningkat (Gambar 2). Selama periode tersebut, produksi daging sapi di Indonesia meningkat rata-rata sebesar 2,76% per tahun. Perkembangan produksi di Jawa sebesar 2,48% dan di luar Jawa 3,88% per tahun. Produksi daging sapi di Indonesia pada tahun 1984 tercatat sebesar 248,48 ribu ton meningkat menjadi 524,11 ribu ton pada tahun 2016. Produksi daging sapi di Jawa pada tahun 1984 adalah 151,58 ribu ton, meningkat menjadi 298,63 ribu ton pada tahun 2016, sedangkan produksi daging di luar Jawa adalah 9,97 ribu ton meningkat menjadi 225.48 ribu ton pada tahun 2016. Perkembangan produksi daging sapi lima

tahun.terakhir cenderung menurun di pulau jawa yaitu sebesar 0,35% per tahun, namun di luar Jawa naik sebesar 2,33% pertahun hal ini ada kaitannya dengan kenaikan harga daging sapi yang semakin tinggi di kota-kota di pulau Jawa. Meskipun harga daging sapi masih tinggi perkembangan produksi daging sapi pertahun naik sebesar 0,76%. Meskipun populasi sapi potong di luar Jawa lebih banyak dibandingkan dengan di Jawa namun produksi daging sapi di Jawa lebih tinggi dibandingkan di luar Jawa. Adapun produksi daging sapi yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.



(Sumber : Pusat Data dan informasi Pertanian, 2016)

Gambar 2. Perkembangan Produksi Daging Sapi di Indonesia

Dampak Pasar Global Terhadap Pasar Sapi Di Indonesia

Daging sapi merupakan salah satu pangan sebagai sumber protein hewani, yang menyumbang 18% terhadap konsumsi daging nasional. Peranannya yang cukup penting tersebut, maka ketersediaan daging sapi dalam negeri dengan harga yang terjangkau, harus menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan izin impor sapi bakalan dan daging sapi yang dikeluarkan pemerintah tahun 1980an semula untuk menyediakan daging murah, sehingga konsumsi daging masyarakat meningkat. Namun, pada saat ini proporsi daging sapi impor telah mencapai 30% dari kebutuhan daging sapi nasional, sehingga mengkhawatirkan bagi kedaulatan dan ketahanan pangan. Swasembada daging yang dilakukan pemerintah merupakan upaya yang

sangat relevan untuk ketahanan pangan, dengan mengurangi ketergantungan impor sampai pada batas 10% dari kebutuhan. Impor daging yang selama ini dilakukan tidak lain untuk mengisi excess demand agar harga tertinggi (ceiling price) dapat dijangkau oleh masyarakat. Penetapan ceiling price yang bertujuan untuk melindungi konsumen, ternyata di sisi lain dapat menjadi disinsentif bagi peternak untuk memelihara sapi. Oleh karena itu perlu ada target produksi (dari sisi supply) dan target konsumsi (dari sisi demand) yang seimbang, agar swasembada daging sapi bisa terwujud.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan, untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas, pemerintah harus melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya agar terjangkau oleh daya beli masyarakat.

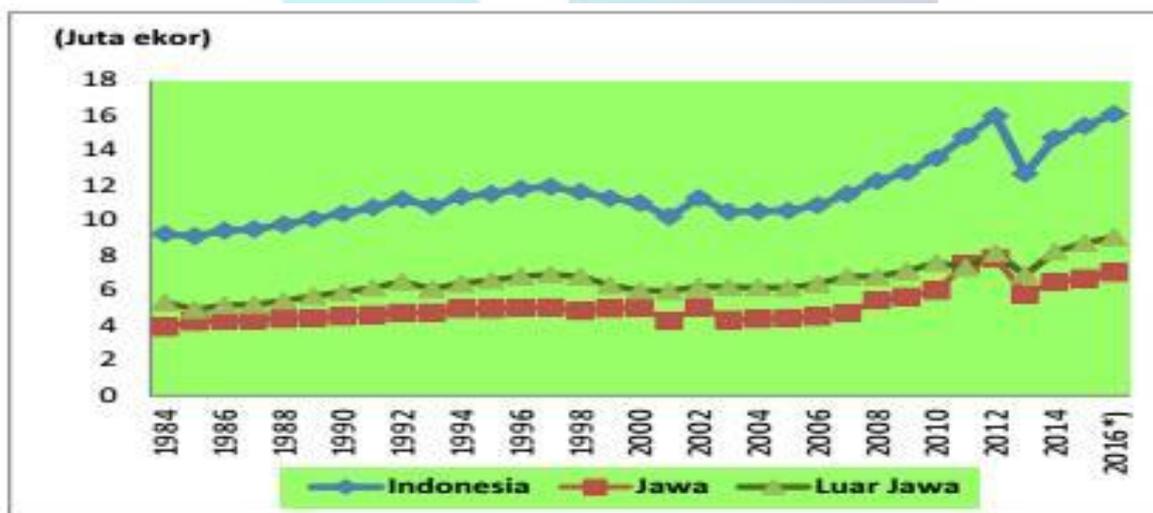
Kondisi ekonomi pasar sapi domestik tidak stabil dan berpola acak, karena terjadi pengaruh yang sangat signifikan dari ekonomi pasar sapi dan daging luar negeri dan variabel-variabel pasar lainnya. Selain itu, ekonomi pasar sapi dalam negeri juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini terjadi karena kuota import sapi dan daging ke Indonesia cukup signifikan, yaitu mencapai 30% dari total kebutuhan pasar dalam negeri.

Potensi Pengembangan Sapi Bali

Secara umum, perkembangan populasi sapi potong di Indonesia baik di Jawa maupun luar Jawa selama periode tahun 1984 – 2016 meningkat 1,95 % (Gambar 3). Pada periode lima tahun terakhir (2012-2016) perkembangan populasi sapi potong sedikit turun dari rata-rata 32 tahun yaitu sebesar 1,13%. Hal ini karena pada tahun 2013 terdapat penurunan yang cukup besar yaitu 20,62% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1984 jumlah populasi sapi potong di Indonesia tercatat sebanyak 9,24 juta ekor, meningkat menjadi 11,94 juta ekor pada tahun 1997. Namun populasi tersebut dari tahun ke tahun terus menurun sampai dengan tahun 2001. Pada tahun 2002 dan tahun 2003 terjadi peningkatan populasi sapi dan penurunan yang cukup signifikan yaitu naik 10,60% dan turun 7,02%. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 perkembangan populasi sapi potong mengalami kenaikan

secara bertahap dari 10,53 juta ekor menjadi 16,09 juta ekor, walaupun sempat turun sebesar 3,29 juta ekor di tahun 2013. Selama periode 2012 – 2016 pertumbuhan populasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 16,09%, sedangkan penurunan populasi yang cukup besar terjadi pada tahun 2013 sebesar 20,62%, hal ini karena pada tahun 2013 terjadi pengurangan angka kuota impor sapi sehubungan adanya program pencahangan swasembada sapi nasional.

Populasi sapi potong di Indonesia sebagian besar berasal dari luar Jawa. Persentase rata-rata jumlah populasi sapi potong di luar Jawa tahun 2016 adalah sebesar 56,34%, selebihnya adalah sapi potong dari pulau Jawa. Pada periode 1984-2016, pertumbuhan populasi sapi potong di Jawa lebih tinggi dari pada di luar Jawa yaitu 2,28%, sedangkan di luar Jawa hanya 1,86%. Pada periode 2012 – 2016 rata-rata pertumbuhan populasi sapi potong di Jawa turun sebesar 1,52% per tahun dan di luar Jawa naik sebesar 3,53% pertahun.



(Sumber : Pusat Data dan informasi Pertanian, 2016)

Gambar 3. Perkembangan Populasi Sapi Potong Di Indonesia

Sapi Bali merupakan *breed* sapi asli Indonesia yang populasinya telah mencapai 2.632.124 ekor atau sekitar 26,92 % dari total populasi sapi potong yang ada di Indonesia (Chamdi, A.N. 2005). Penyebaran sapi Bali telah meluas hampir keseluruhan wilayah Indonesia. Konsentrasi sapi Bali terbesar di Sulawesi selatan, Pulau Timor, Bali dan Lombok, namun kemurnian sapi Bali tetap dipertahankan di

Pulau Bali, sebagai sumber bibit yang pembinaannya dilakukan oleh Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3Bali). Wibisono. (2010) menyatakan bahwa sapi Bali termasuk sapi unggul dengan reproduksi tinggi, bobot karkas tinggi, mudah digemukkan dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga dikenal sebagai sapi perintis. Sebagai sapi asli yang potensi reproduksinya lebih baik dibanding sapi lainnya maka upaya pengembangan sapi Bali sangatlah memungkinkan oleh karena juga didukung oleh kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan produksi daging dalam negeri, penggunaan sapi Bali diberbagai wilayah di Indonesia mempunyai prospek yang sama baiknya.

Dalam perkembangan peternakan sapi Bali telah diperoleh beberapa kemajuan terutama dalam menekan angka kematian pedet. Ardhy Al-Maqasary (2014) menyatakan bahwa angka kematian pedet sapi Bali sebesar 10–80%. Kemampuan lain yang dapat diandalkan untuk pengembangan populasi sapi Bali adalah jarak beranak (*calving interval*) yang cukup baik yakni bisa menghasilkan satu anak satu tahun. Hal tersebut diakibatkan karena manajemen reproduksi yang dilaksanakan di Bali cukup baik yakni perkawinan rata-rata dilaksanakan dengan teknik inseminasi buatan, ditunjang oleh biologi reproduksi dari sapi Bali yang cukup baik yakni fertilitasnya tinggi yakni sekitar 83%.

Rencana pengembangan populasi sapi potong tidak terlepas dari daya dukung wilayah yang meliputi dua hal yaitu ketersediaan ruang tempat ternak dibudidayakan dan ketersediaan pakan ternak untuk kelangsungan hidupnya. Dalam melaksanakan pengembangan populasi sapi Bali, penentuan pengeluaran ternak termasuk pengendalian pemotongan ternak betina produktif perlu diperhatikan, dan menghitung dengan tepat jumlah sapi Bali yang dapat dikeluarkan, agar tidak mengganggu keseimbangannya dari suatu wilayah. Wibisono. (2010) menyatakan bahwa *out put* sapi potong dari suatu wilayah tertentu agar keseimbangan populasi ternak potong tersebut tetap konstan dipengaruhi antara lain *natural increase*, tingkat kematian ternak, kebutuhan ternak pengganti, jumlah ternak tersingkir, pemasukan ternak hidup dan besarnya proyeksi kenaikan populasi ternak di daerah tersebut.

Program Swasembada Daging Di Indonesia

Selanjutnya, ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal ini dipandang strategis karena tidak satupun negara dapat membangun perekonomiannya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pangannya. Khusus bagi Indonesia sektor pangan adalah sekaligus sektor penentu tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk yang bekerja di on-farm yang terdapat di perdesaan yang terdiri dari petani berlahan sempit dan buruh tani yang sebagian besar adalah rakyat miskin (Azahari, 2008). Dalam PP No.68/2002 yang dimaksud Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketersediaan pangan dapat berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Untuk mengukur ketahanan pangan dari sisi kemandirian dapat dilihat dari ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan dalam negeri (Ilham, 2006).

Menurut Purwaningsih (2008) konsep ketahanan pangan diantaranya :

- a. Ketersediaan pangan: ketercukupan jumlah pangan (food sufficiency).
- b. Keamanan pangan (food safety): pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya (food quality) yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- c. Kemerataan pangan: sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata.
- d. Keterjangkauan pangan: kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

Dalam kaitannya dengan program swasembada daging sapi yang dicetuskan sejak tahun 2000 sampai sekarang mengalami pengunduran target (moving target) sebanyak 3 kali. PSDS 2014 sebenarnya merupakan program lanjutan yang telah dicanangkan sebelumnya sejak tahun 2001-2005. Pada waktu itu, program bernama program kecukupan daging sapi yang diartikan tersedianya secara cukup pangan hewani asal ternak khususnya daging sapi sampai tingkat rumah tangga. Pengertian ketersediaan tersebut adalah paling tidak 90 % tersedia dari supply dalam negeri,

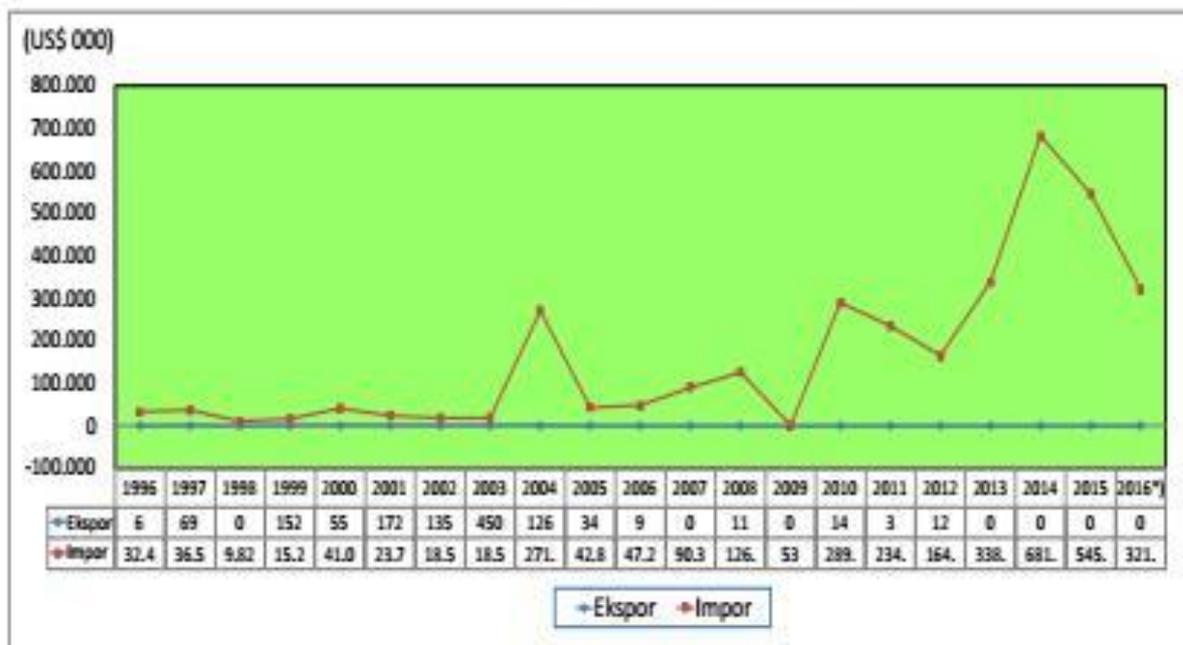
sehingga kecukupan bersifat swasembada on trend, artinya pada kurun waktu tertentu dapat saja dilakukan impor (Handayani. S., A. Fariyanti dan R. Nurmalina. 2016).

Perkembangan volume dan nilai ekspor dari daging sapi di Indonesia pada periode 1996 sampai dengan 2016 cukup berfluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan (Gambar 4 dan Gambar 5). Selama periode tersebut selalu terjadi defisit neraca perdagangan daging sapi yang cukup besar.



(Sumber : Pusat Data dan informasi Pertanian, 2016)

Gambar 4. Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Daging Sapi



(Sumber : Pusat Data dan informasi Pertanian, 2016)

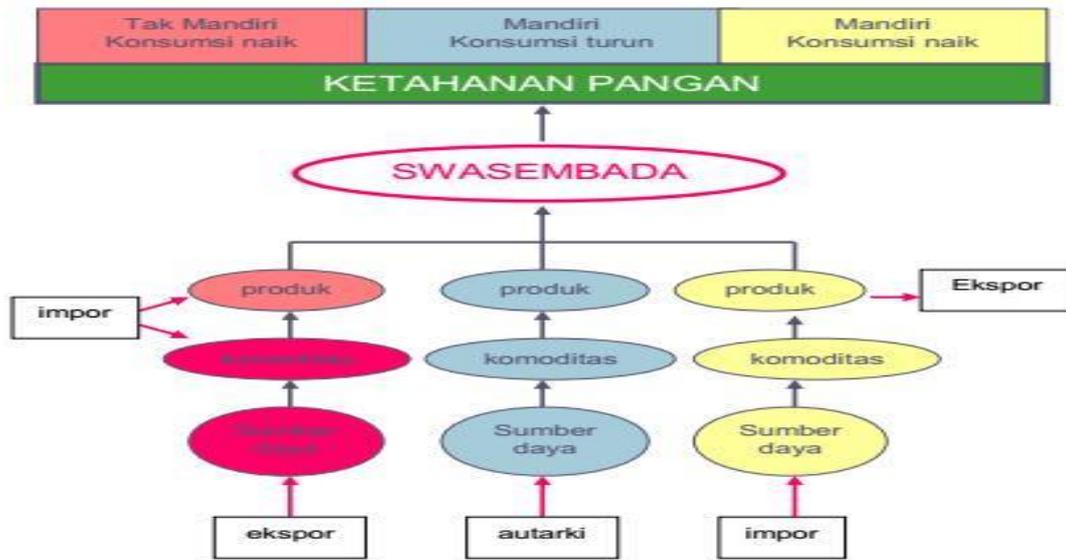
Gambar 5. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Daging Sapi Di Indonesia

Di Indonesia Pada tahun 1996 defisit neraca perdagangan daging sapi Indonesia sebesar 15.769 ton atau setara dengan nilai US\$ 32,43 juta naik menjadi 107.219 ton pada tahun 2016 atau setara dengan nilai US\$ 321,356 juta, Selama tahun 1996 - 2016, impor daging sapi tertinggi mencapai 246.609 ton atau setara US\$ 681,229 juta terjadi di tahun 2014, hal ini di karenakan ketersediaan daging tidak mencukupi untuk kebutuhan rakyat Indonesia, serta dapat di lihat pula tidak terjadi ekspor. Perkembangan Ekspor yang turun di karenakan kebutuhan akan daging sapi di dalam negeri masih kurang, sementara sapi impor akhir-akhir ini di batasi, guna mengalakkan pertumbuhan pemeliharaan sapi potong di dalam negeri. Kecenderungan pengurangan impor daging sapi membuat harga daging sapi di pasaran mengalami kenaikan karena daging lokal dari luar jawa khususnya kawasan timur Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di pulau Jawa sehingga harga daging menjadi tinggi

Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Program Swasembada Daging

Salah satu kebijakan penting Kementerian Pertanian adalah swasembada daging sapi berbasis sumberdaya domestik. Melalui kebijakan ini ketergantungan atas impor sapi dan impor daging sapi diperkecil dengan meningkatkan potensi sapi dalam negeri (Harmini. Asmarantaka dan Atmakusuma. 2011). Kondisi yang terjadi saat ini Indonesia melakukan banyak impor ternak sapi komoditas untuk digemukkan menghasilkan daging. Untuk mendukung program swasembada daging seharusnya hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek.

SINKESJAR



(Sumber : Ilham, 2006)

Gambar 6. Keterkaitan Pemanfaatan Ternak dalam Mencapai Swasembada dan Ketahanan Pangan

Dengan demikian keberadaan sumberdaya yang ada dapat diperbaharui sehingga nilai tambah industri lebih banyak diperoleh di dalam negeri. Sebaliknya saat ini Indonesia tidak boleh mengekspor ternak sumberdaya. Kalaupun hal tersebut dilakukan oleh suatu daerah sumber bibit hanya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia (Ilham, 2006).

Ada tiga kemungkinan bagaimana sumberdaya ternak dapat dimanfaatkan untuk mencapai swasembada sehingga mencapai ketahanan pangan sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6. Jika kebijakan yang diambil adalah autarki –pada gambar posisi tengahswasembada akan tercapai, ketahanan pangan akan mandiri, namun konsumsi produk ternak menurun. Akibatnya kualitas ketahanan pangan menurun. Alternatif ketiga adalah posisi kanan pada gambar, yaitu untuk mencukupi sumberdaya dilakukan impor bibit, kemudian dibudidayakan di dalam negeri sehingga menghasilkan ternak sebagai komoditas dan produk. Upaya ini akan mampu mencapai swasembada pangan dan konsumsi produk peternakan meningkat sehingga ketahanan pangan akan meningkat dan mandiri. Pada kondisi tertentu alternatif ini berpotensi mengekspor ternak sebagai produk (Ilham, 2006).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai swasembada daging diantaranya adalah :

1. Kebijakan Tunda Potong

Sekitar 28 persen sapi yang dipotong setiap hari merupakan betina produktif. Untuk menjaga kelangsungan sumberdaya ternak tersebut pemotongan sapi betina produktif tersebut harus dicegah. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan tunda potong. Ini dilakukan dengan cara membeli sapi betina produktif dan dikembangkan kembali pada peternak yang layak sebagai peserta program. Kebijakan ini sudah banyak dilakukan di berbagai daerah. Dengan adanya program swasembada daging sapi kebijakan ini lebih ditingkatkan lagi. diasumsikan kebijakan tunda potong mampu mengurangi pemotongan betina produktif sebesar 5 persen dari jumlah sapi yang dipotong, meskipun untuk sementara produksi daging sapi domestik menurun. Namun pada akhir masa kebijakan populasi sapi meningkat dan defisit daging sapi hanya turun sedikit. Dalam jangka waktu terjadwal kekurangan tersebut untuk sementara ditutupi dari produk impor. Kebijakan untuk impor daging sapi diatur dalam UU NO 18 tahun 2009 dan UU NO 41 tahun 2014 tentang impor daging sapi. Dalam pelaksanaannya kedua undang-undang ini mempunyai banyak kontroversi diantaranya:

- a. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang belum dikelola secara maksimal termasuk sektor peternakan yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia. UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang kebijakan impor daging dari luar negeri dianggap tidak memperdulikan kondisi peternakan dalam negeri yang hidupnya dari usaha peternakan. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan impor daging ini diambil untuk menjaga stabilitas harga demi membangun ketahanan pangan nasional. Padahal pemerintah melupakan bahwa sebagian besar, para petani kecil, peternak sapi, unggas, dan susu yang ada di pedesaan belum siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan barang-barang impor yang jauh lebih murah.
- b. Pasal 44 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi

terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Adanya Pasal ini jelas berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat peternak. Kebijakan semacam ini jelas akan semakin mematikan usaha-usaha peternakan. Ini adalah bentuk disinsentif kepada peternakan dalam negeri khususnya peternakan rakyat.

- c. Pencantuman frase " unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyat/Pemohon dari resiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan yang dapat membahayakan sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya peternak.
- d. Dalam rangka mengantisipasi puasa dan lebaran, pemerintah melalui Menteri Perdagangan ternyata telah mengeluarkan izin impor triwulan II bagi sapi bakalan sebanyak 250.000 ekor. Untuk lebih mengantisipasi agar harga daging sapi tidak melonjak tajam pemerintah telah menerbitkan pula izin impor sebanyak 29.000 ekor sapi siap potong (Detik finance, 18 Mei 2015). Kebijakan ini sungguh diluar dugaan, karena pada kasus ini jelas-jelas pemerintah sebenarnya telah melanggar UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan kesehatan hewan (PKH). Dimana pada pasal 36B ayat 2, dinyatakan bahwa pemasukan ternak ke dalam negeri harus merupakan bakalan, bukannya sapi siap potong. Seharusnya, pasal ini bersifat pasal karet, yaitu yang bisa menerima berbagai kriteria sapi bagi kepentingan pengembangan sapi potong dan pemenuhan kebutuhan konsumen di dalam negeri. Kenyataan ini, merupakan masalah pertama yang dihadapi pemerintah terhadap UU No. 41/2014 yang sangat kontroversial.
- e. Kontroversi lainnya yang akan menjadi kendala bagi pembangunan peternakan sapi potong terhadap UU ini, adalah mengenai konsiderannya yang ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan upaya maksimum sekuriti terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan dan upaya melakukan pencegahan penyakit hewan. Namun, realitanya dalam pasal pasal pada batang tubuh yang diubah dalam UU ini, malah justru sebaliknya

yaitu menjadi minimum securiti. Misalnya pasal 59 ayat 2 pada UU No. 18/2009 bahwa produk hewan yang dimasukkan ke Indonesia boleh dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan. Pasal ini sebenarnya telah diubah oleh MK menjadi „berasal dari suatu negara“ bukan berasal dari zona dalam suatu negara, tentunya dengan mempertimbangkan „maksimum securiti“. Namun faktanya, dalam UU No. 41/2014 hal tersebut muncul kembali di Pasal 36C. yaitu sebagai berikut: bahwa pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya. Pasal ini jelas-jelas tidak memperhatikan keputusan judicial review yang dilakukan oleh MK di tahun 2009 lalu. Walaupun dalam perubahan ini terdapat perbedaan antara komoditi produk hewan dengan ternak ruminansia indukan. Perbedaan komoditi pada UU No. 18/2009 dengan UU No. 41/2014 tidak serta merta menyebabkan rendahnya resiko yang akan terjadi terhadap berjangkitnya suatu penyakit hewan menular bagi ternak ruminansia.

- f. Kontroversi berikutnya, mengenai perkembangan inovasi teknologi feedlot yang tertera pada pasal 36B ayat 5 yaitu: bahwa setiap orang yang memasukkan bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan. Ayat ini jelas-jelas bahwa pemerintah seolah tidak menghendaki usaha peternakan didalam negeri berkembang secara layak. Bahkan akibat pasal ini, tentunya para pengusaha penggemukan sapi potong akan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan bahwa kemajuan teknologi penggemukan sapi potong dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dari empat bulan, katakanlah dua atau tiga bulan. Artinya, putaran investasi yang ditanam akan memberikan dampak putaran finansial dan ekonomi yang lebih luas lagi. Bukan sebaliknya, putaran modal menjadi lambat dan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi pembangunan ekonomi wilayah perdesaan.

2. Kebijakan Impor Induk Sapi

Jika hanya mengandalkan kebijakan tunda potong program swesembada tidak mungkin tercapai, sehingga diperlukan kebijakan impor induk sapi. Masalahnya siapa yang kompeten melakukan impor tersebut. Sampai saat ini peran Asosiasi Produsen Daging dan Feedlotter Indonesia (Apfindo) dalam perbibitan sapi nasional masih terbatas pada pengguna dan belum sebagai produsen. Hal tersebut sangat berkait erat dengan aspek ekonomi dan insentif yang diperoleh (Ilham, 2006).

3. Pengendalian Sapi Betina Produktif

Kegiatan ini ditargetkan untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif sekaligus memperbaiki produktivitasnya melalui penyelamatan dan pemberian insentif sapi betina produktif dengan kegiatan operasional sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pemberian insentif untuk menyelamatkan sapi betina bunting.
- b. Fasilitasi untuk menyelamatkan dan menjaring sapi betina produktif.
- c. Pembinaan kelompok peternak yang sudah mengembangkan sapi betina produktif dan kelompok peternak pembibit.

4. Penyediaan Bibit Sapi Lokal

Kegiatan ini ditargetkan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan benih dan bibit sapi yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan sapi potong lokal sehingga produksi daging di dalam negeri dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan sebagian besar daging sapi, melalui pelaksanaan kegiatan operasional.

5. Penguatan kelembagaan pembibitan dan wilayah sumber bibit, dengan cara:

- a. Pengembangan pembibitan ternak melalui uji zuriat, uji performans, manajemen pembibitan terpadu
- b. Penguatan UPT/D pembibitan dan sinergisme antar UPT/D lingkup Kementan dalam rangka penyediaan bibit sapi unggul.
- c. Penetapan dan penguatan wilayah pembibitan.

6. Pengembangan pembibitan sapi di kelompok, dengan cara:

- a. Penambahan sapi bibit di kelompok peternak.
- b. Pembinaan dan pendampingan kelompok peternak calon pembibit.
- c. Penerapan GBP untuk menghasilkan bibit sesuai standar.
- d. Penyusunan kriteria *Village Breeding Centre* (VBC)

7. Pengembangan usaha pembibitan melalui Skim Kredit (KUPS), dengan cara:

- a. Pemetaan daerah (peserta KUPS) yang berpotensi dalam penyerapan KUPS.
 - b. Sosialisasi KUPS di pusat dan daerah
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan KUPS
 - d. Pembinaan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan KUPS
 - e. Identifikasi integrasi program KUPS dan program SMD/program lainnya
 - f. Monitoring dan evaluasi
8. Kebijakan Pengadaan Pakan Ruminansia
- Ketersediaan pakan menentukan keberlanjutan usaha peternakan pada suatu wilayah. Di Indonesia sumber pakan ruminansia cukup banyak variasinya, diantaranya dari:
- Limbah pertanian seperti jerami padi, jerami palawija, jerami hortikultura, pelepah sawit dan lain-lain
 - Limbah industri pertanian seperti onggok singkong, kulit nenas, dedak padi, bungkil sawit dan lain-lain
 - Budidaya hijauan pakan
 - Padang penggembalaan.
- Pada saat ini, dua sumber terakhir sering menghadapi masalah karena adanya persaingan dalam penggunaan lahan. Di masa depan arah industri pakan ruminansia sebaiknya lebih kepada pemanfaatan limbah pertanian dan limbah industri pertanian. Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan hal tersebut hingga ketersediaannya kontinu, berkualitas dan harganya bersaing (Ilham, 2006).

Langkah Pendekatan Pengembangan Sapi Potong

pendekatan untuk membangun industri sapi potong yang tangguh. Dari gambaran ideal industri sapi potong dalam negeri dan bertolak dari kondisi aktual serta berbagai kendala yang ada, menurut Guntoro, (2012) Langkah beberapa langkah pendekatan yang mungkin dapat dilakukan adalah antara lain :

- Perlu adanya keputusan politik dari pemerintah untuk membangun industri sapi potong dalam negeri khususnya untuk menangani segmen hulu yang lebih spesifik lagi adalah pada usaha breeding sapi. Tanpa adanya keputusan politik dengan segala konsekuensinya terlalu sulit bagi negara kita untuk menjadi tuan di negara sendiri dalam industri sapi potong. Namun demikian keputusan politik tidaklah

cukup tanpa dibarengi dengan kemauan yang besar dari para pelaku bisnis sapi potong baik di segmen hulu maupun hilir. Dalam konteks pembibitan sapi potong, para investor dipastikan tidak sanggup kalau mengambil kegiatan tersebut sebagai suatu kegiatan bisnis karena di atas kertas ataupun dalam operasional dipastikan usaha breeding sapi tidak feasible. Secara teknis usaha penggemukan sapi dengan jangka waktu yang sangat pendek yakni sekitar 2–3 bulan sangat berbeda dengan usaha breeding sapi yang membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Demikian pula kebutuhan lahan yang luas untuk pembibitan secara komersial. Berita terakhir seperti dilansir oleh berbagai media massa bahwa pemerintah akan menyediakan dana untuk mensubsidi bunga untuk usaha breeding sapi merupakan langkah yang pantas untuk kita acungi jempol. Namun demikian perlu keputusan tersebut di kawal agar dapat menjadi realita. Perlu pula dipertimbangkan bahwa keringanan bukan hanya dari bunga bank, tetapi jangka waktu kredit dan grace period harus diperhitungkan secara cermat agar program breeding sapi dapat berjalan.

- Perlu adanya suatu kesamaan persepsi dari seluruh stakeholder untuk membangun industri sapi potong untuk kepentingan bersama termasuk konsumen daging agar memperoleh daging yang sehat dan harga yang layak dan kompetitif. Efisiensi usaha saja tidaklah cukup. Masih ada unsur lain yang dibutuhkan untuk tegaknya industri sapi potong yakni adanya unggulan yang diyakini dapat memberikan nilai lebih dalam kompetisi.
- Semua unsur yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi harus dihapuskan baik yang didukung dengan peraturan daerah ataupun yang bersifat tidak resmi. Ekonomi biaya tinggi ini berakibat menurunkan efisiensi usaha dan menurunkan daya saing yang tentunya akan mempunyai rangkaian eksekusi dan implikasi.
- Perlu adanya penataan dan peningkatan para usahawan yang bermain di hilir untuk secara serius menggarap pasar dalam negeri ataupun ekspor dengan inovasi-inovasi baru. Selain adanya nilai tambah yang diperoleh, mantapnya segmen di hilir ini akan mempunyai dampak menghela segmen hulu. Dalam konteks ini pemerintah perlu memberikan iklim yang kondusif bagi investor dan ikut serta menggalang potensi yang ada di tanah air untuk memperluas jaringan outlet bagi produk daging ataupun produk turunannya. Berbagai kemudahan

usaha dan juga dalam memperoleh kredit merupakan unsur yang penting untuk memacu perkembangan di segmen hilir dalam industri sapi potong.

- Bertolak kenyataan bahwa sejauh ini sebagian kebutuhan daging dipenuhi dari impor, baik dalam bentuk daging ataupun sapi hidup, maka yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana dapat diperoleh nilai tambah yang maksimal dari komoditi yang di impor tersebut. Apabila melihat angka impor sapi dan daging untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, kita sementara dapat tarik kesimpulan bahwa untuk swasembada dalam arti kata semua daging dipenuhi dari potensi lokal, rasanya sangat berat dan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian tidak berarti bahwa kita tidak berusaha untuk memperbaiki segmen hulu dengan mengurangi ketergantungan kebutuhan sapi bakalan ataupun daging dari luar negeri. Oleh karena itu seperti telah disebutkan diatas, kita harus mampu bertindak secara realistis dan mengupayakan agar komoditas yang kita impor tersebut dapat di maksimalisasi nilai tambahnya dan bila mungkin menjadi komoditas ekspor.
- Kita harus dapat menampilkan unggulan di setiap segmen kegiatan. Kita harus menyadari bahwa efisiensi dalam setiap segmen hulu menjadi kunci keberhasilan dan kuatnya daya saing. Tugas untuk membangun industri peternakan sapi potong yang tangguh di tanah air bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali peluang di masa lalu untuk membangun peternakan yang terlewat begitu saja. Berbagai proyek dari hutang luar negeri tidak jelas hasilnya sampai saat ini. Namun demikian jumlah penduduk yang sangat besar dan semakin meningkatnya sadar gizi dan tingkat pendapatan sebagian masyarakat di yakini bahwa negara kita merupakan pasar yang potensial bagi komoditas daging sapi. Apabila kita tidak mampu memanfaatkan potensi dan peluang pasar yang ada tersebut, dipastikan akan dimanfaatkan oleh negara lain selaras dengan adanya semangat pasar bebas. Pembibitan sapi baik untuk menghasilkan sapi untuk tujuan konsumsi ataupun untuk mengembangkan sapi bibit merupakan satu keharusan. Namun demikian, seperti yang disampaikan diatas, untuk kegiatan ini perlu adanya suatu keputusan politik yang at all cost dari pemerintah.

Pola Pengembangan Sapi Bali

Pola pengembangan peternakan rakyat pada prinsipnya terdapat dua model, yakni (i) Pola Swadaya dan (ii) Pola Kemitraan. Pola swadaya merupakan pola pengembangan peternakan rakyat yang mengandalkan swadaya dan swadana peternak, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan pola kemitraan (PIR-NAK) merupakan kerjasama yang saling antara perusahaan inti dengan peternak rakyat sebagai plasma (Guntoro, 2102). Dijelaskan pula bahwa dalam kerjasama atau kemitraan ini, seluruh kegiatan pra-produksi, produksi hingga pasca produksi dilakukan dengan kerjasama antara plasma dan inti.

Pola pengembangan peternakan rakyat ini akan menjadi landasan utama dalam penentuan alternatif kebijakan pemerintah dalam menopang dan mendorong agribisnis peternakan rakyat berwawasan agribisnis. Apabila persentase pengembangan ternak swadaya mendominasi pada peternakan rakyat, maka peran pemerintah (*government intervention*) mempunyai derajat yang cukup tinggi. Namun demikian apabila kemitraan mendominasi dalam pengembangan peternakan rakyat, maka peran pemerintah relatif berkurang, karena swastanisasi usaha peternakan sudah berkembang. Secara sederhana, peran pemerintah dibagi ke dalam tiga bagian, yakni (1) motivator (*development agent*), (2) fasilitator/services, dan (3) regulator. Derajat intervensi pemerintah dalam penentuan kebijakan pembangunan peternakan ditentukan oleh karakteristik pola pengembangan usahaternak rakyat yang paling dominan.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan peternakan rakyat merupakan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan untuk mensejahterakan petani dalam mengejar ketinggalannya serta dapat meningkatkan produktivitas ternak khususnya ternak ruminansia (sapi Bali).

Secara prinsip pemberdayaan dalam konteks suatu “proses” mengacu pada upaya proses pemberdayaan ekonomi usaha ternak model *mix-Farming*, dari *existing condition* ke *optimum condition (part time)* dan kemudian diarahkan pada usaha ternak yang *sustainable (full time)*. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pemberdayaan tersebut mengacu pada upaya; (1) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, (2) peningkatan pertumbuhan populasi ternak ruminansia dan

(3) upaya menopang terbentuknya “sentra produksi ternak ruminansia di Indonesia”. Prinsip dasar dalam pelaksanaan usaha ternak adalah efisien dan berdaya saing yang mampu mendorong usaha ternak sebagai usaha pokok serta mampu mendukung peningkatan produksi daging ternak ruminansia di Indonesia.

Pola Pemuliaan Ternak Sapi Bali

Menurut Astuti, (1999) Kebutuhan akan adanya suatu Rancangan Program Pemuliaan Ternak Nasional yang mempunyai dasar hukum telah lama dirasakan Selanjutnya dijelaskan bahwa Penyusunan rancangan pengembangan dan pemuliaan diperlukan analisis daya dukung wilayah. Untuk hal tersebut telah dilaksanakan penelitian potensi wilayah di seluruh Indonesia. Hasil yang diperoleh menetapkan wilayah-wilayah pengembangan dengan mengacu pada ketersediaan pakan ternak dengan perhitungan daya tampung per satuan Unit Ternak. Sampai tahun 2016 diperkirakan daya tampung sebesar 36,3 juta ST, potensi ini bervariasi antar provinsi yakni; Jawa dan Bali 55%, Sumatra 22%, Kalimantan 4%, Sulawesi 11% dan Wilayah Indonesia lainnya 8% (*Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2016*).

Dengan demikian terdapat beberapa provinsi yang berpotensi untuk pengembangan ruminansia khususnya sapi Bali. menyatakan bahwa pengembangan ruminansia di wilayah tertentu selanjutnya dilengkapi dengan rancangan peningkatan mutu genetik ternak. Salah satu cara untuk mempertahankan mutu genetik sapi Bali dan berbagai bangsa sapi lain di daerah sumber bibit adalah menghitung dengan tepat jumlah sapi dari berbagai mutu genetik bibit yang dapat dikeluarkan, seimbang dengan jumlah dan mutu bibit yang perlu dipertahankan sebagai ternak pengganti. Selain cara tersebut diatas dapat pula dilakukan persilangan sapi Bali dengan berbagai bangsa lain.

Persilangan sapi Bali dengan berbagai bangsa lain menghasilkan sapi silangan yang menunjukkan sifat pertumbuhan yang meningkat sebanyak 50 – 100 %. Hal ini terutama terjadi sebagai hasil persilangan dengan sapi *Bos Indicus*, *Bos Taurus*, dan berbagai bangsa baru silangan seperti *Santa Gertrudis*, *Droughtmaster*, *Belmot Red*, *Braford*, *Brangus* dan lainnya.

Kendala Pengembangan Breeding Sapi Bali

Program Swasembada Daging yang dicanangkan oleh pemerintah selama ini belum pernah tercapai disebabkan karena banyaknya kendala yang dihadapi di lapang. Adapun kendala yang muncul sehingga menghambat tercapainya Swasembada Daging dikaitkan dengan pengembangan breeding sapi bali, diantaranya adalah :

1. Produktivitas Sapi Lokal Masih Rendah
2. Persilangan Sapi Lokal Tidak Terprogram
3. Hambatan Lompatan Populasi Sapi Nasional

Beberapa faktor penting yang menyebabkan sulitnya terjadi lompatan populasi sapi di Indonesia antara lain :

a. Keterbatasan sumber bibit dan semen beku

Upaya pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi lokal dan skala kepemilikan terkendala oleh ketersediaan bibit dan semen beku yang sangat terbatas. Program penguatan pembibitan berupa insentif pengurangan suku bunga seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) sudah mulai berjalan di masyarakat, demikian pula program SMD (Sarjana Membangun Desa) yang difokuskan pada pembibitan, namun terjadi hambatan dalam pengadaan bibit sapi lokal. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Banyaknya praktek pemotongan sapi betina produktif.
- Rendahnya harga bibit nasional yang tidak mendatangkan insentif bagi peternak untuk menjadi produsen bibit.
- Periode pay back pembibitan sapi memakan waktu sangat lama sekitar 8-9 tahun dengan margin yang kecil
- Pengembangan low input management berbasis pastura untuk pembibitan belum banyak. - Introduksi sapi brahman cross ke peternak tidak berhasil karena banyak peternak belum memahami sifat reproduksi sapi tersebut dan memerlukan pemeliharaan yang mahal untuk mendapatkan kelahiran anak.

b. Ketahanan Pakan Nasional Tidak Tangguh

Berdasarkan proyeksi populasi sapi nasional tahun 2014, kebutuhan pakan konsentrat untuk sapi pembibitan dan penggemukan pada tahun tersebut

diperkirakan mencapai 25,6 juta ton. Laju peningkatan kebutuhan konsentrat dari tahun 2010 sampai tahun 2014 diperkirakan sebanyak 1,34 juta ton per tahun. Permasalahan utama pakan nasional terletak pada sulitnya penyediaan bahan baku secara kontinyu dan berkualitas. Target pencapaian populasi dan produksi serta kualitas daging sangat tergantung kepada ketersediaan (kuantitas dan kualitas) pakan di wilayah yang bersangkutan, karena pakan memegang peranan hingga 80% dari biaya produksi, terutama untuk usaha penggemukan sapi.

c. Pergeseran Fungsi Lahan Penggembalaan

Indonesia adalah negara yang sistem tataguna lahannya masih bermasalah. Tata ruang dan tata guna lahan sering kali dilanggar oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga lahan produktif pertanian sering mengalami alih fungsi karena alasan ekonomi jangka pendek. Dalam statistik peternakan dan BPS, lahan peternakan direpresentasikan sebagai lahan pangonan atau savana, yang angkanya tidak menggambarkan carrying capacity sesungguhnya karena ada nilai proper use factor (PUF) yang bervariasi (nilai 25-40%), sehingga luasan lahan pangonan dalam buku statistik dapat bermakna bahwa populasi sapi berkurang 25-40% jika kapasitas tampungnya 1 ST/ha/tahun. Selain itu, akurasi data luasan pastura menjadi masalah karena kebun rumput dengan cut and carry base tidak dimasukkan dan tidak tercatat secara khusus, serta faktor musim tidak menjadi pertimbangan dalam statistik yang dipublikasikan. Persoalan data pastura (padang penggembalaan dan kebun rumput) akan terus menerus terjadi sehingga akan menyulitkan dalam merencanakan pengembangan populasi, karena nilai Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR) tidak diketahui.

d. Penerapan Biosecurity Masih Lemah

Biosecurity merupakan aspek yang sangat penting bagi pengembangan sapi nasional. Mobilitas dan distribusi sapi antar pulau sangat tinggi dari wilayah kantong ternak, yang berpotensi adanya penyebaran penyakit ternak. Saat ini terdapat 10 provinsi yang memiliki prevalensi brucellosis pada sapi potong sangat rendah (0-2%), yaitu provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Barat, dan 4 provinsi yang masih dicatat memiliki kasus tinggi pada sapi potong, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur (TTU dan Belu), Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara. Dua dari provinsi yang tingkat kejadian brucellosis tinggi merupakan provinsi utama pengembangan bibit ternak, yaitu NTT (Timor Barat) dan Sulawesi Selatan. Kejadian brucellosis di provinsi ini pada awalnya berasal dari sapi-sapi impor asal Australia. Keterbatasan jumlah dokter hewan di daerah menjadi salah satu penyebab rentannya penyebaran penyakit, oleh karena itu pendidikan kedokteran hewan perlu diperluas di beberapa perguruan tinggi di daerah.

KESIMPULAN

- a. Kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia masih mengharapkan import dari negara lain, oleh karena kemampuan ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi belum dicapai.
- b. Untuk meningkatkan populasi sapi perlu diperhatikan tiga hal yakni; sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan.
- c. Pola kebijakan pengembangan diarahkan pada pola kemitraan sehingga peran pemerintah lebih hanya kepada pemberi motivator, sebagai fasilitator dan regulator.
- d. Diperlukan program pemuliaan untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu genetik sapi Bali di Daerah pengembangan.

REFERENSI

- Ardhy Al-Maqasary. <http://www.e-jurnal.com/2014/02/Karakteristik-produktivitas-sapi-bali.html> diakses tanggal 5 Desember 2017.
- Azahari. D.H. 2008. Membangun Kemandirian Pangan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 6 No. 2 : 174 – 195.
- Astuti, M., 1999. Pemuliaan Ternak, Pengembangan dan Usaha Perbaikan Genetik Ternak Lokal. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Pemuliaan Ternak pada Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- BPS. 2015. *Konsumsi Daging Sapi di Indonesia*. Tersedia pada www.bps.go.id.
- Azahari. D.H. *Membangun Kemandirian Pangan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional*. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 6 No. 2 : 174 – 195.

- Chamdi, A. N. 2005. Karakteristik Sumberdaya Genetik Ternak Sapi Bali (*Bos-bibos banteng*) dan Alternatif Pola Konservasinya. Jurusan Produksi Ternak Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jurnal Biodiversitas ISSN: 1412-033X. Volume 6, Nomor 1 Januari 2005 Halaman: 70-7.
- Ditjennak. 2010. *Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.
- Guntoro, S. 2012..Membudidayakan Sapi Bali. Cetakan ke-7. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Handayani. S., A. Fariyanti dan R. Nurmalina. 2016. *Swasembada Daging Sapi Analisis Simulasi Ramalan Swasembada Daging Sapi Di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 1: 57 – 64.
- Harmini., R.W. Asmarantaka dan J. Atmakusuma. 2011. Model Dinamis Sistem Ketersediaan Daging Sapi Nasional. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 1 : 128-146.
- Haris Budiyono,2014.Analisis Neraca Perdagangan Peternakan dan Swasembada daging sapi 2014. Jurnal Agribisnis dan Pengembangan wilayah Vol.1 No.2,Juli 2014
- Ilham. N. 2006. Analisis Sosial Ekonomi Dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 4 No. 2 : 131-145.
- Purwaningsih. Y. 2008. *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 1: 1 – 27.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2016. *Out Look Daging Sapi Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan*. Sekretaris Jenderal-Kementrian Pertanian. <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/outlook/2016/Hortikultura/OUTLOOK%20NENAS%202016/files/assets/common/downloads/OUTLOOK%20NENAS%202016.pdf>
- Santosa, Kholid, Warsito, S.ST dan Agus Andoko. 2012. *Bisnis Penggemukkan Sapi*. Penerbit Agro Media Pustaka. Jakarta.
- Talib, C., K Uswandi, Chalijah, dan A.R. Siregar. 2000. Usaha memperpendek calving interval pada sapi Bali di Sulawesi Selatan. Laporan ARM Project. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Wibisono. 2010. <http://ohsapi.blogspot.co.id/2010/05/analisa-sapi-bali.html> diakses tanggal 5 Desember 2017.
- Yulianto Purnawan. 2012. *Penggemukkan sapi Potong Hari per Hari 3 Bulan Panen*. Penebar Swadaya. Jakarta